

	News Title : Bappebti Resmikan Bursa Kripto Indonesia, Jadi Pertama di Dunia	
	Media Name : Tokocrypto.com	Journalist : Bianda Ludwianto
	Publish Date : 21 July 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Policy Regulations	Topic : Bursa Kripto

Policy & Regulation

Bappebti Resmikan Bursa Kripto Indonesia, Jadi Pertama di Dunia

Published 15 hours ago on July 21, 2023
by Bianda Ludwianto

Bulan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akhirnya resmi menetapkan pendirian bursa kripto dan membuka pendirian bursa di Indonesia. Keputusan ini menjadi kabar yang baik, karena sebelumnya bursa kripto atau bursa berjangka aset kripto sudah terwujud sejak tahun 2021.

Dalam keterangan resminya, setelah melalui proses panjang serta sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, Bappebti menetapkan pendirian bursa kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01.BA/PB/PT/2023-BAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Peraturan sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara.

Selain itu, Bappebti juga menerbitkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01.BA/PB/PT/2023-LBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Peraturan sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk Penjaminan dan Penyelidikan Perdagangan Pasar Risk Aset Kripto kepada PT Kliring Berjangka Indonesia.

Khalau yang juga diartikan oleh Bappebti adalah Pengelola Tempat Penyetoran Aset Kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01.BA/PB/PT/2023-PTPAK/07/2023 tertanggal 01 Juli 2023 tentang Peraturan sebagai Pengelola Tempat Penyetoran Aset Kripto kepada PT Trust Depositary Indonesia.

"Pembentukan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut sebagai bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian hukum dan memperoleh perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggannya," kata Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko dalam keterangan resminya diujung jamat (GUP).

Kepastian Hukum dan Jamin Keamanan Konsumen

Ilustrasi pasar kripto di Indonesia

Baca juga: [Menteri Di Mahayasa: Aset Kripto Memiliki Banyak Peluang dan Tantangan](#)

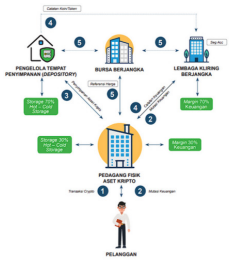
Lebih lanjut, Didid menjelaskan bahwa pendirian bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Risk Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Risk Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022.

"Pembentukan yang dilakukan pada masa transisi Undang-undang Pengembangan dan Pengaturan Dana Investasi (UU DIPA) dilakukan agar dapat kripto Indonesia yang berkelas dan terintegrasi dengan baik, serta mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui penanaman tenaga," jelas Didid.

Bappebti tidak bekerja sendiri dalam pengembangan dan pengaturan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Didid menjelaskan melibatkan kolaborasi dari Kementerian Keuangan terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Perdagangan serta masyarakat luas.

"Perdagangan aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Secara umum, aset kripto bisa mengalami fluktuasi harga yang signifikan yang dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik di masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto," jelas Kepala Bappebti.

Pertama di Dunia



Ilustrasi mekanisme perdagangan aset kripto. Sumber: Bappebti.

Baca juga: [Bulan Pasar Terlibat Jadi OJK Pengawasan Kripto, Juli 7 Puluhan Ditransfer](#)

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, sempat berujar menyatakan bursa kripto yang hadir di Indonesia juga akan menjadi yang pertama di dunia. "Berapa juga yang pernah membuat aset kripto yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian hukum dan memperoleh perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggannya," kata Jerry diujung jamat (GUP).

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 untuk dapat memperoleh persetujuan sebagai penyelenggara Bursa Berjangka wajib memenuhi persyaratan yang salah satunya memiliki modal dasar paling sedikit Rp 500 miliar. Dan dalam jangka waktu tiga bulan setelah persetujuan diberikan, memiliki modal dasar minimal paling sedikit sebesar Rp 1 triliun, atau paling sedikit sebesar 2% dari nilai transaksi yang difasilitasi atau diproses.

Tugas Bursa Berjangka sendiri adalah bertanggung jawab mengawal pelaksanaan transaksi Pasar Risk Aset Kripto agar berjalan dengan tertib, teratur dan transparan. Bursa Berjangka yang telah menyelenggarakan pendirian untuk menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto tidak dapat menyelenggarakan transaksi untuk subyek Komoditi lainnya.

DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informatif dan bukan merupakan fawan atau saran untuk membeli dan menjual aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas berisiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, dimana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan tidak terduga. Tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai aset kripto.